

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM PEMERIKSAAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SMART AUDITING) DI INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**

PUTRI AULIA ERPITA SURYANA

E011171002



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

PUTRI AULIA ERPITA SURYANA (E011171002), Evaluasi Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik (Smart Auditing) di Inspektorat Kota Makassar. 65 Halaman + 3 Gambar + 2 Tabel + 34 Pustakawan (1987-2022) + 11 Lampiran, Dibimbing Oleh Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP dan Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc

Pemeriksaan Berbasis Elektronik (Smart Auditing) merupakan pengembangan model pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Program ini menjadi implementasi dengan Konsep Smart City oleh Pemerintah Kota Makassar yang mengharuskan perangkat daerah menerapkan teknologi dan informasi untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta upaya untuk mencegah berbagai penyimpangan (fraud) yang mungkin dapat terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan Organisasi.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program berbasis elektronik (Smart Auditing) di Inspektorat Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori dari konsep E-Auditing untuk melihat tingkat keberhasilan sistem elektronik auditing dengan indikator: (1) keberhasilan sasaran, (2) kepuasan terhadap program dan (3) tingkat input dan output. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemeriksaan berbasis elektronik atau dikenal dengan Smart Auditing di Inspektorat Kota Makassar telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan. Namun, masih perlu adanya peningkatan pada bidang sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya tujuan, peningkatan pemahaman dibidang Teknologi dan Informasi untuk para pelaksana dan komitmen serta disiplin dari Organisasi Perangkat Daerah kedepannya.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik, Smart Auditing



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

PUTRI AULIA ERPITA SURYANA (E011171002), *Evaluation Of The Electronic-Based Inspection Program (Smart Auditing) At The Makassar City Inspectorate.* 65 Pages + 3 Pictures + 2 Table + 34 Librarians (1987-2022) + 11 Attachements, Guide By Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP and Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc

Electronic-Based Auditing (Smart Auditing) is the development of an internal monitoring model by the Regional Inspectorate of Makassar City to improve accountability and performance in managing activities and finances in all Regional Apparatus Organizations within the Makassar City Government. This program is an implementation of the Smart City Concept by the Makassar City Government which requires regional officials to apply technology and information to streamline the implementation of their main tasks and functions thereby increasing accountability and transparency as well as efforts to prevent various irregularities (fraud) that may occur in the process of implementing Organizational activities.

The aim of this research is to describe and find out the results of the evaluation of the implementation of electronic-based programs (Smart Auditing) at the Makassar City Inspectorate. This research uses qualitative research methods through case studies. Data collection taken with observation, interview, and documentation of directly involved informants in implementation of that activities. The process of data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion.

This research uses theory from the E-Auditing concept to see the level of success of electronic auditing with indicators of (1) the success of the target, (2) satisfaction to the program and (3) levels input and output. The results of the research conducted show that the implementation of the electronic-based inspection program or known as Smart Auditing at the Makassar City Inspectorate has been carried out well and has succeeded in achieving its objectives. However, there is still a need to improve facilities and infrastructure to support the achievement of goals, increase understanding in the field of Technology and Information for implementers and commitment and discipline from Regional Apparatus Organizations in the future.

Keywords: Program Evaluation, The Electronic-Based Inspection Program, Smart Auditing



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI AULIA ERPITA SURYANA
NIM : E011 17 1002
Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang : S-1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Evaluasi Program Pemeriksaan Berbasis Elektornik (Smart Auditing) Di Inspektorat Kota Makassar" adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 21 Desember 2023



Putri Aulia Erpita Suryana

E011 17 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : PUTRI AULIA ERBITA SURYANA

NIM : E011 17 1002

Program studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik
(*Smart Auditing*) di Inspektorat Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan Tim Penguji Skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 5 Desember 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP

NIP. 19720507 200212 1 001

Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA., M.Sc.

NIP. 19761023 200501 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si

NIP 19631015 198903 1006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : PUTRI AULIA ERPITA SURYANA
NIM : E011 17 1002
Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik
(*Smart Auditing*) di Inspektorat Kota Makassar

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi program sarjana
Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Desember 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.AP
Sekertaris : Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.PA., M.Sc
Anggota : 1. Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si
2. Dr. Muhammad Yunus, MA

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya. Serta shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, yang telah membawa ummat manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Kebaikan terlimpah untuknya, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan Stara Satu (S1) sebagai media melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik (Smart Auditing) di Inspektorat Kota Makassar".

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Abah Pipin Suryana dan Ibunda Syamsiah Ernawaty, yang telah banyak berkorban dengan segenap perhatian, kasih sayang, dorongan moril dan materil serta doa yang tak terputus sehingga menghantarkan penulis berada pada titik ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada saudari penulis satu-satunya Adinda Nurcahya Suryana yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, menemani dan memberikan hiburan selama proses penyelesaian skripsi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta para staf dan jajarannya;
3. Prof. Dr. Alwi, M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi dan Bapak Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P dan Bapak Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., M.PA., M,Sc selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu, membimbing, serta mengarahkan penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Moch. Thahir Haning, M.Si dan Bapak Dr. Muhammad Yunus, MA selaku penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas kesediaannya dalam menghadiri sidang proposal dan skripsi, juga atas segala motivasi, arahan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk penulis selama perkuliahan. Semoga menjadi manfaat dan amal jariyah;
7. Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan kelengkapan administratif bagi penulis selama ini;
8. Seluruh staff pegawai Inspektorat Kota Makassar, yang telah memberikan waktu, ruang dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian;
9. Teman-teman LEADER 2017, terima kasih atas segala bentuk bantuan, perhatian, pelajaran hidup bersama selama proses perkuliahan, semoga dalam jarak akan tetap terasa kebersamaan serta semoga sukses dan cita-cita bersama pasti tercapai;
10. Terima kasih kepada keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS yang menjadi tempat berproses dan tempat penulis mendapatkan pengalaman berorganisasi;
11. Terima kasih kepada keluarga besar UKM SENI TARI FISIP UNHAS, terutama SODEC 3 yang sudah memberikan pengalaman terbaik dibidang kesenian untuk penulis;
12. Terima Kasih untuk persahabatan yang sudah terjalin lamanya "KEBELS", Indri, Nisa, Dep, Widia, Cici, Nanda, Tanti, Salsa, Fahdah dan Nabila sebagai saudara tak sedarah yang selalu memberikan bantuan dan support tanpa batas, yang selalu ada dimasa sedih dan bahagia penulis,

dan selalu mencurahkan kasih sayang dalam bentuk apapun. Semoga semua yang menjadi impian kita bersama dapat segera terwujud;

13. Terima kasih teman seperjuangan diperkuliahan "ELDAYS" Fira, Fifa, Ifa, Titania, Mardiyah, Supri, Fitri, Ajid, Arham dan Claudia atas segala warna kehidupan kampus yang tidak akan pernah terlupakan, terima kasih atas pengorbanan waktu dan pikiran untuk penulis, semoga tetap terjalin persahabatan ini menuju kesuksesan bersama;
14. Terima kasih penulis sampaikan untuk Indra Adhitama Aprisalni, S.Tr.Pel., yang telah memberikan kebahagiaan dan dukungan terbaik kepada penulis, semoga cita-cita dan niat yang baik bisa terwujud & disegerakan;
15. Terima kasih kepada diri sendiri yang selalu kuat dan bertahan menjalani kehidupan. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.

Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan serta doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disusun dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan sebagai manusia biasa, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu bermanfaat terutama bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Wassalaamu 'Alaikum Waraaahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 1 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian	5
I.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
II.1 Konsep Kebijakan Publik.....	6
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	6
II.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	7
II.1.3 Tujuan Kebijakan Publik	9
II.2 Konsep Evaluasi	9
II.2.1 Pengertian Evaluasi	9
II.2.2 Indikator Evaluasi	11
II.3 Konsep Evaluasi Program	14
II.3.1 Pengertian Evaluasi Program	14
II.3.2 Model-Model Evaluasi Program	15
II.3.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program	17
II.4 Konsep Sistem <i>E-Auditing</i>	17
II.5 Konsep Program <i>Smart Auditing</i> Inspektorat Kota Makassar.....	23
II.6 Penelitian Terdahulu	24
II.7 Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
III.2 Lokasi Penelitian.....	28

III.3	Fokus Penelitian	29
III.4	Informan	30
III.5	Sumber Data.....	30
III.6	Teknik Pengumpulan Data	31
III.7	Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		34
IV.1	Gambaran Umum Kota Makassar	34
IV.2	Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar	35
IV.2.1.	Visi dan Misi Inspektorat Kota Makassar.....	35
IV.2.2.	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Makassar	35
IV.2.3.	Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan Inspektorat Kota Makassar	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
V.1	Hasil Penelitian	42
V.1.1.	Keberhasilan Sasaran	44
V.1.2.	Kepuasan Terhadap Program	47
V.1.3.	Tingkat Input Dan Output.....	51
V.2	Pembahasan	55
BAB VI PENUTUP		59
VI.1	Kesimpulan.....	59
VI.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan Publik	8
Gambar 2.2. Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar	39
Gambar 5.1. Sistem Kerja Smart Auditing	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Evaluasi	13
Tabel 4.1. Populasi Penduduk Kota Makassar Tahun 2022	34

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era Reformasi bentuk penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas adanya pelimpahan wewenang pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang bertujuan untuk memberikan kekuasaan pemerintah daerah dalam mengatur segala urusan dan bertanggungjawab atas daerahnya masing-masing dalam hal ini pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, pengelolaan keuangan dan pengaturan kegiatan dilingkup pemerintahan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keberhasilan pemerintahan yang baik dan bersih secara optimal. Mardiasmo (2005) menyebutkan tiga aspek utama pendukung pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Di Kota Makassar, pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah Kota Makassar melaksanakan pengawasan internal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara konkrit dalam mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara garis besar, pemeriksaan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar. Manan & Mannayong (2017:152-153) menjelaskan bahwa Inspektorat Kota Makassar melakukan pemeriksaan sebagai teknik pengawasan langsung pada objek untuk menilai hasil pelaksanaan yang dilakukan dan mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan. Pemeriksaan dilakukan secara khusus pada bidang yang krusial dalam organisasi

yaitu terhadap aparat pemerintah daerah dan pemeriksaan pada bidang keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan ini disebut dengan audit internal, kegiatan audit internal dilakukan oleh auditor yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional dalam memeriksa kinerja pemerintah.

Pada setiap kegiatan tentu tidak selamanya berjalan dengan baik. Begitu juga dalam pelaksanaan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan inspektorat daerah. Kendala yang sering terjadi pada proses *auditing* yaitu pertama, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja bersertifikasi yang kurang dalam mengelola pemeriksaan dan pengawasan, dimana jumlah auditor tidak sebanding dengan beban pelaksanaan tugas pengawasan. Beban kerja yang semakin tahun semakin meningkat tetapi pelaksanaan dan pemeriksaan masih dilakukan secara manual ditambah. Kedua, permasalahan jarak lokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relatif jauh dan memakan waktu dengan sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan internal secara langsung menjadi tidak efisien dan kendala terakhir yaitu mendeteksi *fraud* yang terjadi pada instansi yang diawasi. Hal tersebut tidak mudah terdeteksi hanya dengan audit biasa. Diperlukan ketajaman auditor dan informasi lebih dari pihak eksternal auditor untuk mendeteksi *fraud* atau kecurangan (baktinews.bakti.or.id, 2020).

Dalam berita online Sulselmengabari.com (2018) melaporkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar pada tahun 2018 menunjukkan jumlah program kegiatan pada lingkup Pemerintah Kota Makassar yaitu 581 program dan 4.097 kegiatan dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 2.8 Trilyun, dan harus melalui proses audit. Proses pemeriksaan yang dilakukan secara manual tentu akan memakan waktu dan biaya yang banyak. Terkhusus Inspektorat Kota Makassar yang memiliki 23 auditor bersertifikasi

dipandang tidak seimbang dengan peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membuat kebijakan idealnya 70-100 orang auditor yang melakukan audit berkelompok.

Salah satu pendekatan yang efektif dan efisien adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Upaya pemanfaatan ini tentunya dilakukan oleh sebagian besar sektor pemerintah atau Lembaga negara. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk perbaikan atas permasalahan yang ada. Penggunaan teknologi diterapkan pemerintah pusat dalam membantu kinerja auditor. Sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk memodernisasi sektor pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efisien, transparan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Salah satunya yaitu Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menerapkan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques* (CATTs). TABK merupakan instrumen yang membantu Auditor mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur audit yang dikhususkan untuk pengujian Data dan Perangkat Lunak (<https://itjen.dephub.go.id>, 2019).

Pada lingkup pemerintah daerah, Pemerintah Kota Makassar salah satu yang melakukan inovasi pemeriksaan internal berupa penggunaan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) dalam pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kota Makassar. Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) ini merupakan sistem yang berperan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban, pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar tak hanya

itu sistem ini juga menyediakan big data pertanggungjawaban. Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) yang diterapkan Inspektorat Kota Makassar diharapkan menjawab tantangan dan memberikan manfaat lebih untuk mempermudah tugas dan fungsi pokok Inspektorat. Urgensi dari penerapan program ini yaitu menjadikan pengawasan fungsional pemerintah daerah yang lebih optimal demi tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meminimalisir berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Terkait dengan pelaksanaan program tersebut maka dibutuhkan adanya evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dalam program ini. Dunn (2003:608) mendefinisikan evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan atau program tersebut memberikan *effort* terhadap tujuan atau sasaran. Maka dengan adanya evaluasi kebijakan atau program dapat memaparkan kinerja yang bermakna dan masalah-masalah organisasi teratasi. Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) ini dalam pelaksanaannya diperlukan evaluasi untuk melihat tidak hanya hasil pemanfaatannya untuk perbaikan pengawasan internal oleh Inspektorat terhadap lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Oleh karena itu perlu adanya penelitian terkait **Evaluasi Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) di Inspektorat Kota Makassar.**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, “Bagaimana pelaksanaan program Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) Inspektorat Kota Makassar?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program pemeriksaan berbasis elektronik (*Smart Auditing*) Inspektorat Kota Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan membeirkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta informasi bagi penelitian selanjutnya, menjadi bahan kajian terkhusus pada ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan kontribusi pemikiran kepada seluruh pihak yang terkait terkhusus Pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan program *Smart Auditing* oleh Inspektorat Kota Makassar sebagai bentuk hasil evaluasi dan pemebenahan yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu *public policy*. Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk menentukan pilihan yang terpenting dalam kehidupan, baik kehidupan berorganisasi maupun pemerintahan serta privat. Carl J. Friedrich (1969) dalam Agustino (2008:7) mengartikan kebijakan sebagai satu rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, maupun sekelompok orang dalam lingkungan tertentu dengan secara jelas menunjukkan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dye (1992:2) "*public policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah yang akan dilakukan atau tidak dilakukan). Dikatakan kebijakan publik apabila berupa segala bentuk pilihan pemerintah baik dikerjakan maupun tidak dikerjakan secara bijaksana dengan suatu tujuan yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian.

Menurut Anggara (2014:14) mendefinisikan kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berkaitan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak terpilih) yang dibuat oleh aktor dalam perangkat pemerintah. Secara khusus produk kebijakan publik harus mampu mengakomodasi kepentingan yang berbeda dalam upaya menata kepentingan lebih luas.

Menurut Anderson (1984) dalam Wulandari (2021) memberikan definisi kebijakan publik yaitu serangkaian kegiatan yang memiliki maksud atau tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor maupun sekelompok aktor yang saling berhubungan dengan suatu permasalahan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang dikerjakan daripada apa yang diusulkan.

Wahab (1991:13) kehadiran kebijakan publik merupakan kerangka yang dibuat terkhusus oleh pemerintah bukan sekedar apa yang diputuskan untuk dilakukan tetapi secara kompleks untuk memecahkan masalah publik yang bertumbuh di masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

II.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dunn (2003:22) menerangkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik divisualisasikan berupa serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan diatur menurut urutan waktu. Tahap-tahap tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik yaitu :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Menurut Madani (2011) menyebutkan dalam penyusunan agenda (*agenda setting*) meliputi suatu rangkaian tindakan dan strategi (*actions dan strategies*) yang didalamnya terdapat isu tertentu yang menjadi perhatian masyarakat (*public attention*).

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003) menyebutkan bahwa formulasi kebijakan merupakan tahap dimana para pejabat merumuskan berbagai alternatif-alternatif kebijakan untuk menjawab setiap masalah. Alternatif tersebut dibuat melihat perlunya perintah eksekutif, keputusan peradilan dan beberapa tindakan legislatif.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Tahap ketiga yaitu adopsi kebijakan, hal ini menyangkut tentang alternatif kebijakan yang diadopsi atau dihimpun dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga maupun keputusan pengadilan.

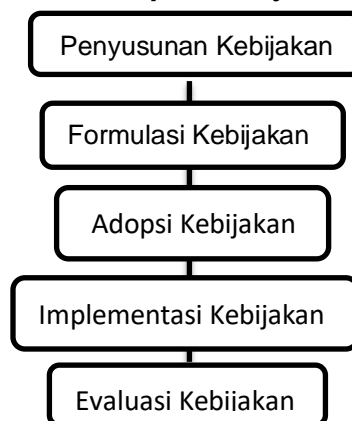
4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program hanya menjadi catatan penyusunan agenda jika tidak dilaksanakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah di ambil secara tepat dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya serta finansial.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, tidak hanya menginterpretasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat tetapi juga menilai serta mengkritik dengan ditentukannya kriteria-kriteria sebagai ukuran untuk menyesuaikan kembali permasalahan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Evaluasi kebijakan merupakan unsur fungsional dari tahapan kebijakan publik karena akan menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijakan pemerintah

Gambar 2.1. Tahapan Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn, (2003)

II.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Hayat (2017:33-34) mengemukakan tujuan kebijakan publik dapat dibedakan melalui:

1. Sumber daya, yaitu antara kebijakan publik yang memiliki tujuan mendistribusikan sumber daya negara. Salah satu contohnya berupa kebijakan daerah yang menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola masing-masing wilayahnya
2. Regulatif dan deregulatif, dalam hal ini kebijakan regulatif memiliki sifat terbatas dan teratur. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat bebas.
3. Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan dinamisasi merupakan kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya untuk mencapai kemajuan tertentu salah satu contohnya kebijakan desentralisasi. Kebijakan stabilisasi adalah kebijakan yang berfungsi untuk menghambat dinamika yang akan merusak sistem baik sistem politik, ekonomi, dan sosial
4. Memperkuat negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara merupakan contoh kebijakan yang mendorong besarnya peran negara. Sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau publik merupakan contoh kebijakan yang mendorong besarnya peran publik atau mekanisme pasar dibandingkan negara contohnya privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

II.2 Konsep Evaluasi

II.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai penilaian, penilaian yang dimaksud yaitu nilai atau penentuan manfaat dari suatu kegiatan. Jadi evaluasi merupakan suatu usaha dalam mengukur dan memberi nilai secara objektif dalam pencapaian hasil kegiatan. Adapun evaluasi menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Anderson (2003:151) yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan dan terlaksana untuk mendukung tercapainya tujuan. Adapun Dunn (2003:608) menyebutkan istilah evaluasi memiliki arti yang saling berhubungan. Setiap istilah masing-masing merujuk pada skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Dunn mendefinisikan evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Secara spesifik bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan atau program tersebut memberikan *effort* terhadap tujuan atau sasaran. Maka kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna dan masalah-masalah organisasi teratasi.

Worthen dan Sanders (1979) dikutip dari Darodjat & Wahyudhiana (2015) menyatakan pula bahwa evaluasi sebagai kegiatan mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian menurut Petri (1986) dalam Divayana & Sugiharni (2016:159) berpendapat bahwa "*evaluation is a process through which a value judgment or decision is made from a variety of observation and from the background and training of evaluator.*" Evaluasi yaitu suatu proses dimana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dari berbagai pandangan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator. Sedangkan Menurut Griffin & Nix (1991) dalam Darodjat & Wahyudhiana (2015) menyatakan bahwa pengukuran, penilaian dan evaluasi adalah hirarkis. Kegiatan evaluasi didahului oleh penilaian (*assessment*) sedangkan penilaian didahului pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan hasil pengamatan sedangkan

penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil dan evaluasi yaitu penetapan nilai.

Dari beberapa definisi yang diuraikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan tahapan dalam implementasi kebijakan sebagai proses penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan, apakah kebijakan telah terealisasi dengan baik atau belum dan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut secara layak dapat dilanjutkan dan berprogres atau tidak.

II.2.2 Indikator Evaluasi

Menurut Dunn (2003) terdapat enam kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kinerja yaitu :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan apakah suatu alternatif tersebut mencapai tepat hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan tersebut. Lubis dan Huseini (1987:54) menyebutkan efektivitas merupakan komponen penting dalam organisasi karena mampu memberi gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya. Sasaran yang dimaksud yaitu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dampak yang dihasilkan tidak dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi maka dapat dikatakan gagal.

2. Efisiensi

Menurut Mahmudi (2010) efisiensi pada dasarnya sebagai proses untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan atau mengukur perbandingan output terhadap input yang digunakan. Berbicara mengenai efisiensi, berbicara mengenai penggunaan sumber daya yang optimal. Jadi efisiensi dikatakan bahwa berkenaan dengan jumlah usaha

yang diperlukan dalam menghasilkan tingkat efektivitas yang telah ditentukan.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah suatu yang menyangkut dengan seberapa jauh tingkat efektivitas. Dunn (2003) menilai bahwa kecukupan menggambarkan seberapa jauh hasil yang telah tercapai kemudian dapat memecahkan suatu masalah dalam organisasi.

4. Perataan

Dunn (2003) mendefinisikan perataan adalah sesuatu yang erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta majemuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat. Secara sederhana dalam suatu organisasi digambarkan bahwa bagaimana biaya dan manfaat yang tercapai terdistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kunci perataan yaitu pencapaian sasaran serta akuntabilitas.

5. Responsivitas

Konsep ketanggapan atau responsivitas menurut Dwiyanto (2006:50) Responsivitas merupakan kemampuan yang dimiliki organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program sesuai kebutuhan masyarakat. Indikator ini melihat keselarasan antara program dan kebutuhan untuk melihat kinerja organisasi. Organisasi dengan responsivitas yang rendah jelas memperlihatkan kinerja yang kurang baik. Menurut Dunn (2003:437) responsivitas yaitu berkenaan tentang seberapa jauh kebijakan dapat menjawab kebutuhan, prefensi atau nilai masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenan dengan satuan kriteria secara bersama-sama. Ketepatan yang dimaksud merujuk pada nilai dari tujuan suatu program serta kuatnya asumsi terhadap menyangkut substansi tujuan tersebut, bukan cara maupun instrumen untuk merealisasikan tujuan. Artinya ketepatan diisi dengan keberhasilan kebijakan.

Tabel 2.1. Indikator Evaluasi

No.	Indikator	Fokus
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : William N. Dunn, (2003:610)

II.3 Konsep Evaluasi Program

II.3.1 Pengertian Evaluasi Program

Program merupakan serangkaian kegiatan untuk merealisasikan ataupun wujud implementasi dari suatu kebijakan yang berkesinambungan secara terus menerus dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Arikunto & Jabar (2009) dalam Novalinda, et al., (2020:139) memberikan definisi bahwa evaluasi program ialah proses mendeskripsikan, meneliti, menghimpun informasi maupun data, melakukan penyajian informasi maupun keterangan kepada pengambil kesimpulan dan menilai apakah sumber yang diperlukan dalam melaksanakan suatu program tersedia dan terukur kualitasnya dalam menyokong pencapaian tujuan.

Fitzpatrick et.al. (2004) dikutip dari Novalinda, et.al. (2020:140) Evaluasi program merupakan evaluasi yang menitikberatkan pada pertanyaan mengenai fokus perhatian, pengumpulan informasi yang sesuai kemudian dianalisis dan diberikan definisi untuk pengaplikasian pada tujuan yang khusus. Menurut Suratman (2017) mengemukakan bahwa evaluasi program ialah studi sistematis yang dilakukan untuk melihat seberapa baik program berjalan dan memberi hasil secara efektif dan efisien. Melalui evaluasi program selain menilai hasil implementasi juga mendukung adanya pendekatan yang baru dan inovatif, pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik kedepannya, serta kinerja yang terukur dan terarah.

Adapun menurut Moekijat (1995:180) mendefinisikan evaluasi program merupakan proses untuk menentukan *value* (nilai) atau layaknyanya mengukur betapa baik penyelesaian yang sesungguhnya dari program yang sedang berlangsung terkhusus program yang telah selesai sesuai dengan harapan. Sedangkan Briekerhoff (1983) dalam Ananda & Rafida (2017:6) menjelaskan evaluasi program

yaitu proses menentukan sejauhmana tujuan dan sasaran program telah terealisasi, memberikan informasi dalam pengemabilan keputusan, membandingkan kinerja standar untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian serta penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas program.

II.3.2 Model-Model Evaluasi Program

Secara lengkap para ahli evaluasi kebijakan membagi model-model evaluasi kedalam beberapa kelompok yang kemudian dikembangkan dan digunakan mengevaluasi suatu kebijakan dan program. Adapun model evaluasi sebagai berikut:

1. Model Evaluasi Berbasis Tujuan (*Goal Oriented Evaluation Model*)

Model Evaluasi ini dikembangkan oleh Ralph W. Tyler pada tahun 1940-1950an. Menurut Tyler (1950) dalam Novalinda, et al., (2020) menyebutkan model evaluasi ini diterapkan untuk mendeskripsikan pencapaian dalam suatu program, secara lengkap disebutkan bahwa model evaluasi program ini berfokus pada pengukuran perspektif tujuan yang ditetapkan pada kerangka kerja, tidak mengevaluasi yang diluar dari tujuan rancangan program serta fokus pada akhir program untuk mengukur pencapaian.

2. Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal Free-Oriented Evaluation Model*)

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Michael Scriven pada tahun 1973. Menurut Mardiah & Syarifuddin (2018:44-45) model evaluasi bebas tujuan berbanding terbalik dengan model pertama oleh Tyler (1950), hal tersebut terlihat pada pandangan evaluator, pada evaluasi berbasis tujuan sejak awal proses terus terpantau sejauh mana tujuan telah dicapai. Sedangkan dalam model bebas tujuan, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan tujuan program tetapi

bagaimana kinerja suatu program dengan mengidentifikasi hal-hal yang sekiranya mempengaruhi baik hal positif (yang diharapkan) maupun sebaliknya.

3. Model Evaluasi CIPP (*CIPP Evaluation Model*)

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam & Shinkfield pada tahun 1965, menggunakan pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan (*a decision oriented evaluation approach*) yang bertujuan membantu administrator dan pemimpin dalam pengambilan keputusan. Mahmudi (2011) model evaluasi CIPP merupakan model yang memiliki kerangka kerja komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif atas program, proyek, personel, produksi, organisasi dan sistem evaluasi, ia juga berpandangan bahwa tujuan model evaluasi program bukan membuktikan (*to prove*) tetapi meningkatkan (*to improve*). Model ini juga dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (*improvement-oriented evaluation*) maupun bentuk evaluasi pengembangan (*evaluation for development*) yang artinya model CIPP diterapkan untuk mendukung perkembangan organisasi dan menjadi masukan secara sistematis sehingga organisasi lebih mampu memenuhi kebutuhan penting, bekerja secara optimal dengan sumber daya yang ada. Model ini terdiri dari empat indikator evaluasi yang berkesinambungan dalam rangkaian kerja sistematis yang merupakan singkatan dari *Context, Input, Process & Product*.

II.3.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Program

Arikunto dan Jabar (2009) dalam Novalinda et.al. (2020) mengatakan bahwa tujuan evaluasi program ialah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan mengetahui keterlaksanaan kegiatan sebuah program. Adapun menurut Roswati (2018:66-67) tujuan serta manfaat evaluasi program yang diuraikan sebagai berikut :

1. Menilai manfaat dari hasil program yang terlaksana, yang kemudian dapat dianalisis program tersebut dapat ditindak lanjuti atau tidak diteruskan.
2. Memberikan informasi mengenai strategi atau teknik yang perlu digantikan atau dihilangkan atau cukup diperbaiki dengan mempelajari dampak atau akibat sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Mengadakan usaha perbaikan bagi program dengan melihat bagaimana hasil pendekatan program dapat diterima dan diterapkan.

II.4 Konsep Sistem *E-Auditing*

Pada tahun 2010, terdapat pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Pimpinan Lembaga Negara dalam hal ini untuk mendukung luncurnya Sistem *E-Auditing*. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meluncurkan sistem *E-Auditing* dengan memanfaatkan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tujuan untuk mengalihkan paradigma dan proses kerja pemeriksaan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi akhir ini. Dengan begitu sistem e-audit tentu menjadi harapan besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan, mengurangi adanya kecurangan demi akuntabilitas keuangan negara dan pelaksanaan yang lebih akurat. (Dharmawati et.al.,2019)

E-Auditing adalah sistem yang kolaborasi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dan sistem informasi milik entitas pemeriksa (*e-auditee*) melalui

komunikasi data online serta membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pusat data ini memuat seluruh informasi keuangan dari seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah. Informasi keuangan meliputi transaksi keuangan, laporan keuangan pemerintah, dan data pendukung lainnya. Pusat data ini akan digunakan oleh pemeriksa untuk membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan. Siklus pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK melalui e-Audit yaitu:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan,
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, penyusunan RKP dan,
3. Melakukan perencanaan pemeriksaan selanjutnya.

Contoh dalam pemanfaatan e-Audit yakni pada tahap perencanaan pemeriksaan, dimana pada tahap ini terdapat kegiatan pemahaman entitas. Pemahaman entitas tersebut memerlukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Dengan memanfaatkan sistem e-Audit, data dan informasi yang diperlukan terkumpul dipusat data dalam waktu singkat dan dapat dimanfaatkan lebih awal oleh pemeriksa sehingga akan menghemat waktu pemeriksaan.. Pemeriksa dapat menggunakan sistem e-auditing ini melalui portal yang dapat diakses dimanapun ia bertugas selama ada jaringan internet. (Sutarto, 2015).

Menurut Gondodiyoto (2007) dalam Sutarto (2015) bahwa pelaksanaan Audit dengan bantuan sistem komputer atau elektronik memberikan dampak tersendiri dalam prosedur audit. Dikarenakan sistem berbasis elektronik mengubah desain sistem informasi maupun struktur pengendalian internalnya berupa bukti jejak audit (*Audit Trail*) namun sejatinya tidak merubah konsep dan tujuan audit itu sendiri (*General Financial Audit*).

Menurut Agoes (2012:13) pemeriksaan berdasarkan sistem E-auditing dikembangkan untuk melihat hasil dari prinsip manajemen dalam audit yaitu ekonomi, efektivitas serta efisiensi. Peran auditor sangat penting dalam pemeriksaan terutama pada bidang keuangan, tenaga ahli ini perlu memastikan apakah sistem telah berjalan dengan sebaik-baiknya atau terjadi *fraud*.

Menurut Nindyastuti dan Kiswara (2014) Secara garis besar pengertian Audit Elektronik atau *E-Audit* adalah audit dengan bantuan komputer yang menggunakan catatan elektronik untuk menyelesaikan semua atau bagian dari audit. E-Audit pemerintah dilaksanakan dengan mempersiapkan software yang disesuaikan untuk membentuk suatu database yang menyimpan berbagai informasi kinerja keuangan entitas pemerintah. Audit dalam konteks teknologi informasi adalah memeriksa apakah sistem komputer berjalan semestinya.

Adapun Menurut Dharmawati et.al., (2019) dalam konsep E-Audit terdapat indikator untuk melihat tingkat keberhasilan sistem elektronik untuk auditing yaitu:

A. Keberhasilan Sasaran (*The Success Of The Target*)

Sebuah program dapat dikatakan berhasil guna, jika program dapat terlaksana dengan kemampuan operasional yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program digambarkan jika pada prosesnya dan mekanisme dilapangan mencapai sasarannya. Sasaran yang dimaksud yaitu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai atau seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur sistem yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lubis & Huseini, 1987). Pada sistem *E-Auditing* dalam pelaksanaannya keberhasilan berkaitan bagaimana pemeriksaan akan lebih efektif dan efisien, serta proses dan penyelesaian pemeriksaan pemeriksaan lebih mudah dan cepat, dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, kemudian

apabila ternyata yang dihasilkan tidak dapat mencapai output maka dikatakan gagal. (Dharmawati, et.al. 2019).

Keberhasilan sasaran ditinjau dari pencapaian tujuan, keterkaitannya dengan efektivitas pelaksanaannya. Apakah tujuan yang ditetapkan sebelumnya tercapai sesuai harapan (Trisnawati dan Nuryanah, 2022)

B. Kepuasan Terhadap Program (*Satisfaction To The Program*)

Menurut Trisnawati dan Nuryanah (2022) Kepuasan merupakan kriteria yang mengacu pada keberhasilan sebuah program dalam memenuhi kebutuhan. Kepuasan dapat diukur dan dirasakan oleh pengguna atas kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin tinggi kualitas produk dan layanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan pengguna, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi institusi. Sistem *E-auditing* juga memberikan banyak manfaat, seperti pengelolaan data yang lebih cepat karena mudah dioperasikan dengan fitur-fitur yang membantu pengguna, dokumentasi bukti audit yang lebih lengkap dan efisien serta pengurangan penggunaan kertas. (Dharmawati, et.al., 2019).

Menurut Hong, et.al. (2002) ketika teknologi sistem informasi menyediakan informasi, dokumen-dokumen yang relevan dengan apa yang dicari pengguna maka akan memudahkan pengguna untuk menemukan sesuai kebutuhannya.

Kepuasan terhadap program juga dilihat dari upaya dalam mencapai tingkat pemahaman terhadap auditor dalam menjalankan sistem kerja berbasis elektronik, serta efektivitas dan efisiensi percepatan pemeriksaan dokumen membuat adanya dampak perubahan nyata atau peningkatan kinerja (Dharmawati, et.al., 2019).

C. Tingkat Masukan Dan Keluaran (*Input and Output Level*)

Menurut Trisnawati & Nuryanah (2022) Tingkat efektivitas masukan dan keluaran dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika keluaran lebih besar dari masukan dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika masukan lebih besar dari keluaran dapat dikatakan tidak efisien. Dalam E-Audit, *Input* berkaitan mengenai upaya pemeriksaan dengan mengoptimalkan sumber daya dan sarana prasarana, sedangkan *output* berkaitan dengan bagaimana hasil percepatan yang sesuai dan maksimal. Jadi, semakin optimal dalam keterbatasan, mudah dilaksanakan dan dipahami pengguna maka semakin besar percepatan pemeriksaan dan kepuasan terhadap program E-Audit. (Dharmawati, et.al., 2019). Pelaksanaan E-Audit di BPK mempermudah pemeriksaan dan mendorong transparansi dan akuntabilitas data entitas yang diperiksa, maka audit internal melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lebih efisien karena menghemat waktu pemeriksaan.

Keuntungan menggunakan sistem e-auditing antara lain pelaksanaan pendataan lebih cepat, pemeriksaan laporan keuangan lebih cepat karena dilakukan dengan bantuan komputer, dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam. Menurut Sutarto (2015) ada beberapa keunggulan yang didapatkan dari penerapan e-Audit antara lain yaitu:

- a. Membantu mengatasi masalah ketimpangan antara banyaknya objek pemeriksaan dan terbatasnya sumber daya. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sehingga meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

- b. Pemanfaatan e-Audit dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pemeriksaan.
- c. Sistem e-Audit mampu memberikan informasi yang berkualitas.
- d. E-Audit dapat mendorong peningkatan kualitas pemeriksaan. Data-data entitas dalam format digital yang terstruktur yang tersimpan dalam *database* memberikan kemudahan bagi auditor untuk melakukan pengolahan data dalam jumlah yang lebih besar sehingga cakupan audit lebih luas. Untuk itu auditor harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai dalam penggunaan komputer. E-Audit dibangun untuk memudahkan pekerjaan pemeriksa dengan cara menyediakan data awal secara terjadwal dan mengotomasi langkah pemeriksaan.
- e. E-Audit dapat berfungsi sebagai *early warning system* jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sektor publik sehingga dapat lebih efektif mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan pada sektor publik.
- f. Kemudahan bagi entitas yang diperiksa untuk menunaikan kewajiban dalam hal pemberian data dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Pengiriman data yang dilakukan secara sistemik dan otomatis akan membentuk proses pengiriman data secara terjadwal, tidak memakan waktu dan tidak merepotkan entitas. Kemudian, proses pelaksanaan tindak lanjut dapat dilakukan secara *online* dari entitas menggunakan internet sehingga menghemat waktu dan sumber daya lainnya.
- g. Pengadaan peralatan teknologi informasi entitas yang ekonomis tidak terlalu membebani keuangan negara/daerah.

II.5 Konsep Program *Smart Auditing* Inspektorat Kota Makassar

Seiring dengan perkembangan teknologi, dampak yang diberikan secara tak langsung dirasakan terhadap pemerintahan dalam pemenuhan hajat hidup warga negara. Sektor publik yaitu kementerian/Lembaga Negara melakukan inovasi untuk kesinambungan teknologi dalam melaksanakan pelayanan prima dengan merambah kepada kinerja berbasis online. Salah satunya dampak berkembang teknologi informasi mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tahapan dalam proses audit internal pemerintahan. Inspektorat adalah auditor internal pemerintahan daerah untuk mengawasi perangkat pemerintah hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Makassar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Inspektorat Daerah Kota Makassar melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di jajaran Pemerintah Kota Makassar. Di Kota Makassar Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) merupakan salah satu inovasi dalam bidang pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kehadiran program *Smart Auditing* diresmikan oleh Inspektorat bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, untuk mengintegrasikan *E-Budgeting* dan *E-Auditing* sehingga memudahkan dalam memeriksa buku kas umum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

SMART audit merupakan singkatan dari *Selective Monitoring and Assesment of Risks and Trends* (Pengawasan dan Penentuan Selektif atas Resiko dan Tren). Metode ini merupakan gabungan penentuan resiko dan audit analitis, agar mencerminkan efektivitas sistem kontrol internal yang memungkinkan auditor segera mengidentifikasi masalah potensial, tren yang tidak menguntungkan dan fluktuasi yang tidak normal. Penerapan *Smart Auditing* berfungsi dalam menyediakan big data untuk menunjang kelancaran kegiatan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan Inspektorat dalam rangka *Probit Audit* untuk deteksi dini *fraud* yang mungkin dapat terjadi karena pelaksanaan pemeriksaan surat pertanggungjawaban dapat dilakukan lebih cepat secara real time dengan sistem online tidak terbatas ruang dan waktu. Tujuan inovasi *smart auditing* sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi lebih teratur dan tepat waktu,
- b. Akses dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) menjadi mudah dan terdapat database dokumen SPJ secara terpusat untuk seluruh OPD.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh perangkat kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar.

II.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini membantu bagi peneliti dalam melakukan penelitian untuk menjadi sumber literatur dan memberikan pandangan teori terkait penelitian yang dilakukan. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan oleh Manan dan Mannayong (2017) yang berfokus pada penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai penyelenggaraan pengawasan intern dengan membagi tiga variabel sebagai tahapan dalam pengawasan yaitu : a) Pemeriksaan, b) Pengujian dan c) Tindak Lanjut. Hasil penelitian berfokus menunjukkan proses Inspektorat Kota Makassar menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dari segi pemeriksaan meliputi aparatur dan bidang keuangan, pengujian berupa prosedur atau kebijakan dan laporan keuangan, serta tindak lanjut pengawasan. Manan dan Manayong (2017) berpendapat bahwa terdapat koordinasi yang baik antara Inspektorat Kota Makassar (Tim Auditor/ Pemeriksa) dengan pihak terperiksa/auditee dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma et.al. (2022) yang menganalisis program *smart auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teori Sutrisno (2007) dengan indikator yaitu a) Pemahaman Program, b) Tepat Sasaran, c) Tepat Waktu, d) Tercapainya Tujuan & e) Perubahan Nyata. Irma et.al. (2022) berpendapat bahwa Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar berjalan dengan efektif. Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa program *smart auditing* memberikan kemudahan terhadap Auditor dengan jumlah yang terbatas untuk menyelesaikan kegiatan pemeriksaan serta akses dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) menjadi jauh lebih cepat kemudian OPD terkait lebih tertib dan tepat waktu dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Tetapi prosesnya memiliki hambatan karena program *Smart Auditing* masih tetap dalam tahap proses

pemantauan, dan Organisasi Perangkat Daerah masih membutuhkan pendampingan dalam pengimputan data (Irma et.al.,2022)

Penelitian yang dilakukan Kusyanuarto dan Akbar (2018) yang mengevaluasi peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dengan mengambil studi kasus di Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sebagai indikator mengukur peran konsultasi yang optimal harus dapat memenuhi empat kriteria yang terdapat dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Empat kriteria peran konsultasi tersebut menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM). Kusyanuarto & Akbar (2018) berpendapat bahwa, Inspektorat Kabupaten Paser baru memenuhi dua kriteria dari empat syarat utama sehingga peran konsultasi yang dilakukan belum optimal karena adanya hambatan internal dan eksternal.

II.7 Kerangka Pikir

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian Evaluasi Program Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) pada Inspektorat Kota Makassar maka peneliti membuat kerangka pikir. Kerangka pikir ialah penjelasan konseptual mengenai objek permasalahan berdasarkan tinjauan pustaka, tujuannya sebagai landasan dalam melakukan penelitian maka dari itu kerangka pikir harus jelas dan mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep E-Audit yang dikemukakan oleh Dharmawati et.al., (2019). Dalam konsep E-Audit terdapat indikator untuk melihat hasil tingkat keberhasilan sistem elektronik untuk auditing yaitu:

1. Keberhasilan Sasaran
2. Kepuasan Terhadap Program
3. Tingkat Input dan Output

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kerangka Pikir

